

---

# Demokrasi dan Pemilu Kepala Daerah

Imas Sumiati \*

---

## *Abstract*

*Telescoped Indonesian democracy with the election of regional heads lenses are not adequate. Democracy will be up and flying, when the pillars; power system, system of government, political system, and other powerful systems and stake. If the stake was false pillar, pretending to be just as if, then even this democracy only 'Mastur stale'; as though and pretended firm, ostensibly strong, but weak and limp.*

*The most important issue in the election of regional heads or even any election is how far the effectiveness of the election itself. So far the election is generally less effective. Voters and the candidates chosen to satisfy lust is merely political, to be a winner. All realized, including the election, when in the course of five years. Let alone the concept to advance the region, even gave the concept to themselves as the regional head did not recognize. Eventually bring the area and positioned himself on a targeted orientation (disorientation)*

*Key Word: democracy.*

## **Pendahuluan**

Tahun 90-an William Liddle gagal meng-kalkulasi politik Indonesia. Padahal saat itu demokrasi Indonesia yang disebut orde baru (orba) sebagai demokrasi pancasila barangkali relatif simpel dipetakan dibanding kepolitikan hari ini. Kekuatan politik setidaknya yang bernama partai politik saat itu hanya ada dua (PDI, PPP) dan Golkar. Parpol sekarang pasca orba sudah berdesakan. Pemilu 1999 (48 parpol) pemilu 2004 (24 parpol) pemilu 2009 (38 parpol) dan khusus di NAD ditambah 6 parpol lokal.

Kekuasaan saat itu terstruktur dari Presiden sampai kepala desa/lurah, sehingga melahirkan birokrasi bukan saja kuat, tambun, terstruktur menjalar, tapi juga meraksaksa dan menggurita. Sentral kekuasaan tidak saja di pemerintahan Jakarta (pusat) tetapi juga di daerah secara bertingkat. Daerah Tingkat (DT.I) untuk pro-vinsi dan DT.II untuk kabupaten/ kotamadya. Ini legal, UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah menyatakan bahwa

kepala daerah adalah penguasa tunggal di daerah.

Tahun 1998, kekuasaan orde baru berakhir. Gong pembukanya ditabuh dan terus dikawal dengan idealisme mahasiswa yang terakumulasi dalam gerakan reformasi. Sontak semua terbangun setelah ditidurkan 32 tahun; ada yang marah, ada yang senyum, ada yang limbung, ada yang terbahak, ada yang biasa saja. Yang jelas, bahwa daya dobrak pemilik kedaulatan yang bernama rakyat itu jauh sangat dahsyat ketika digunakan. Kekuatan politik Indonesia ini barangkali yang terlupakan dalam kalkulasi Liddle.

Kalau Liddle saja, gagal meneropong, kepolitikan Indonesia saat itu. Mungkinkah ada teropong akurat untuk Indonesia hari ini? dengan multi partainya yang cenderung tidak terbatas? dengan sistem pemilunya yang melibatkan seluruh rakyat? dengan kebijakan /regulasi yang lebih sering tidak ajeg dan zigzag? Yang pasti ini tidak lebih sederhana, apalagi meneropong demokrasi Indonesia hanya sekedar melalui moment pemilu kepala

---

\* Dosen FISIP Unpas, Sekretaris Prodi Adm Negara FISIP Unpas Bandung, dan Bendahara Nasional Asosiasi Ilmu Administrasi Negara Indonesia.

daerah. Namun tidak berarti kepolitikan Indonesia hari ini tidak dapat dipelajari.

Liddle dan para Indonesianis lain tentu terbatas untuk kepentingan ilmu dengan cukup bekal ilmu. Para ilmuwan *pituin* (ilmuwan asli Indonesia), tidak sekedar ilmu. Pada para ilmuwa *pituin*, memiliki nafas ideologi, kekentalan emosi dan nasionalisme. Temuannya bukan sekedar menggelar apa yang senyatanya, tetapi mesti membentangkan idealisme keilmuan bagaimana demokrasi Indonesia seharusnya. Naif, kalau tidak demikian.

Walau pada persimpangan itu kita agak sering tersasar, kita gunakan dengan bangga berbagai perangkat keilmuan produk luar negeri, hasil penelitian di luar negeri. Kemudian untuk membedah kondisi dalam negeri kita adop sepenuhnya sebagai pisau analisis seutuhnya. Ketika terjadi ketidakcocokan, yang kita salah-kan adalah kondisi yang kita bedah, bukan mengevaluasi pisau bedahnya. Ketersasaran dan ke-*linglung*-an akademik ini berimplikasi bisa sangat jauh dan patal.

Mengapa demokrasi yang telah kita telan bulat-bulat dan diidolakan praktiknya tidak sedikit mengecewakan, banyak tidak seirama, ti-dak senapas, tidak seadat-budaya, tidak sesuai jati diri, tidak sesuai masa depan yang akan dituju? Padahal demokrasi yang dipilih mestinya telah mengukur bukan saja kondisi sosial yang terjadi hari ini, tetapi juga apa yang bakal terbentuk pada lapisan dan siklus generasi jauh di masa datang.

Karena itu selepas orba saya tidak melihat penting untuk mempolemikan demokrasi 'ala' mana atau versi apa yang dikiblati. Yang saya merasa perlu adalah menebarkan pemahaman demokrasi yang wajar, yang lumrah, sesuai dengan tuntutan fitrah, sifat dan kudrot umum manusia. Kalau bersebrangan, berlawanan bah-kan merusak nilai kemanusiaan, maka klaim demokrasi tersebut pasti keliru.

Artinya jikapun tidak persis, namun idealnya demokrasi banyak sama dan sebangun dengan fitrah kemanusiaan, setidaknya fitrah yang paling dasar. Yang menurut saudara-saudara kita di pedesaan dan dulur-dulu di

perkampungan bahwa demokrasi itu artinya "terbebaskan". Bebas menyatakan pendapat dan pilihan, bebas dari sara takut, bebas dari rasa lapar, bebas dari kebodohan.

## Demokrasi

Menurut salah seorang 'mbah Filsafat Yunani Kuno; Plato, bahwa demokrasi itu bukan bentuk pemerintahan yang paling ideal. Dari Timokrasi, Oligarki, Anarki dan Tiranni yang paling ideal adalah Aristokrasi, dimana yang memimpin negara adalah kaum filsuf. Hanya kaum inilah yang dibimbing oleh cita keadilan. Negara disebut adil manakala para pemimpin-nya dapat menguasai diri sendiri dalam segala hal dan keadaan. Bentuk pemerintahan negara yang dipimpin satu golongan kecil ini dengan baik dan adil disebut aristokrasi.

Pemerintahan ini sulit diwujudkan, dunia ini adalah alam nyata bukan alam ide. Karenanya demokrasi adalah salah satu opsi yang terpaksa harus dipilih. Sebab dalam demokrasi keberpihakan pemerintahan kepada rakyat yang nota bene umumnya rakyat miskin identitas wajib. Bila kemelaratan umum yang ditimbulkan oligarki telah tidak tertahankan lagi, maka rakyat miskin memberontak dan merebut kekuasaan. Pemerintahan demokrasi meng-utamakan kebebasan sebagai reaksi terhadap penderitaan rakyat karena praktik penindasan oligarki.

Oligarki, merupakan sistem pemerintahan di mana segolongan kecil warga negara saja yang memegang kekuasaan pemerintahan, membuat ketentuan semauanya, sehingga kemungkinan orang lain duduk dalam pemerintahan dibatasi, apalagi partisipasi rakyat.

Dari sisi rakyat yang umumnya miskin itulah saya memahami bahwa demokrasi adalah suatu kondisi dimana manusia saling memahami dan menghormati atas semua latar belakang yang difitrahkan berbeda. Demokrasi merupakan kondisi natural kemanusiaan yang memposisikan semua latar belakang manusia secara proporsional dan terhormat tanpa sekat apapun. Etnik, gender, agama, kultur, warna

kulit, ideologi, partai politik, bangsa, negara dan apapun, ini hanya latar identitas saja.

Dari pemahaman itu, maka seorang demokrat sejati adalah manusia yang dapat memahami dan menghormati orang lain menyatakan pendapat, manusia yang dapat memerdekakan dan membebaskan orang lain dari rasa takut, dari rasa lapar, dan dari kebodohan. Jika tidak mampu melakukan itu, sekurang-kurangnya ia tidak mengerangkeng orang lain, tidak membuat takut orang lain, tidak membuat miskin dan lapar orang lain, serta tidak menghalangi orang lain pintar atau tidak membuat orang lain bodoh.

Dari sisi *ke-Ilahiyah-an*, pruralitas adalah kekayaan yang lengkap, sempurna dan fitrah bagi manusia dan mutlak bagi Tuhan. Allah SWT menyebutnya agar manusia satu sama lainnya saling kenal-mengenal. Bukan saling rambo-ramboan, jago-jagoan, musuh-musuhan, perang-perangan dan bunuh-bunuhan. Kata satu 'sama' lain saling kenal, bermakna egaliterian-kesetaraan. Artinya dimata Tuhan tidak penting ada manusia yang mengklaim superior atas lainnya. Tuhan hanya menilai manusia dari ketaqwaannya saja.

Heterogenitas itu adalah sub-sub versi dari identitas umum kemanusiaan, esensinya untuk memudahkan manusia. Sejak penciptaannya, Tuhan telah sangat mengukur bahwa manusia sebenarnya bodoh, serba tidak tahu, walau sering mengkalim merasa pintar, bukan pintar merasa. Dengan kata lain bahwa multi latar belakang itu adalah untuk memudahkan manusia dalam mengurus dan mengatur, mengidentifikasi manusia lain sesuai kepentingan.

Pada sisi lain, Tuhan maha mencintai keindahan dan berkesenian. Secara musikalitas, pruralisme itu agar terjadi harmoni dan keseimbangan. Betapa sulit, ribet, tidak indah, menegangkan, semua ingin jadi jagoan, semua bersyahwat ingin menguasai kalau hanya satu warna dan satu jenis. Para kiyai, mengakui perbedaan itu adalah berkah. Inilah demokrasi.

## Demokrasi Indonesia

Meneropong demokrasi Indonesia hanya berbekal lensa Pemilu Kepala Daerah tentu

tidak cukup memadai. Pemilu kepala daerah lebih pas sebagai para meter kedewasaan dan partisipasi masyarakat pada demokrasi lokal di daerah. Walau saya setuju bahwa demokrasi Indonesia dikokohkan juga oleh perkembangan demokrasi lokal sebagai salah satu pilarnya, dalam kerangka NKRI. Dengan catatan kalau daerahpun yang sudah sangat berpartisipasi itu, diposisikan sebagai kekuatan. Bukan diabaikan dan dilemahkan.

Demokrasi suatu negara, tidak terkecuali Indonesia tidak terbentuk instan. Ia terbangun melintasi berbagai dimensi waktu, sejarah, ideologi, kultur, ekonomi, sosial, politik dll yang kemudian mewujudkan menjadi jati diri, identitas, nasionalisme suatu negara yang sekaligus membedakan dengan identitas negara lain. Karena inilah tidak dapat dipaksakan demokrasi suatu negara di-terapkan pada negara atau diadopsi sepenuhnya oleh negara lain. Difahami jika Indonesia pernah menganut paham demokrasi terpimpin dan demokrasi pancasila.

Sayang, praktik demokrasi Indonesia hari ini semacam dibanyangi keraguan, sakit dan tidak percaya diri. Yang tampak adalah demokrasi semu, setengah hati, pura-pura atau seolah-olah. Sistem kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif tidak jelas, apakah sparasi atau distribusi kekuasaan. Yang tampak bukan sinergis, *adumais*, saling menapasi dan me-nguatkan, tetapi *adu geulis*, gontok-gontokan, saling meng-intimidasi, melemahkan dan melecehkan.

Kekuasaan eksekutif tidak jelas kelaminnya antara presidensial dan parlementer. Kabinetnya campursari dari berbagai latar belakang parpol, dan setengah hati. Sehingga menteri di satu sisi bertanggungjawab kepada presiden, di hati lain-nya bertanggungjawab kepada pimpinan partai. Uniknya atas kebancian ini kita memaklumi. Kita melumrahkan kalau pimpinan parpol memiliki target menjadi menteri, atau seorang menteri ambisius menjadi pimpinan parpol. Implikasinya pemerintahan sering tertiuap badai, kerap gontai dan tidak stabil.

Padahal konstitusi kita menetapkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah Presiden-sil. Artinya Presiden memiliki kekuatan, memiliki hak prerogative yang

dijamin UUD 1945 untuk mengangkat atau memberhentikan para menteri. Keraguan menerapkan sistem presidensial justru mengamputasi kekuasaan presiden sendiri yang telah secara *legitimate* kuat karena dipilih langsung oleh rakyat.

Kekuasaan legislatif menganggang antara bikameral atau monokameral. MPR yang di dalamnya terdiri atas DPR dan DPD adalah sinyal awal bahwa Indonesia menganut bikameralisme. Namun praktiknya tidak terjadi. DPD yang memiliki legitimasi kuat dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu tidak diangkat oleh Presiden seperti utusan daerah massa orba tidak memiliki kewenangan yang sepadan. DPD, dikatakan Jimly Assidiqi sebagai *co legislator*. Ia tidak memiliki kewenangan, karenanya tidak memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan politik apapun.

Implikasi dari DPD yang tidak berdaya itu, maka aspirasi masyarakat dan daerah yang telah memilihnya menjadi terbengkalainya. Pada lima tahun pertama (2004-2009) barangkali belum terasa sebagai masalah, namun kalau ini dibiarkan berlarut, bukan mustahil kalau se-mangat awal agar daerah berdaya melalui pelaksanaan otonomi, atau untuk penguatan NKRI yang dikawal DPD, berbalik arah menjadi gerakan separatisme setidaknya gerakan ke-daerahan yang liar dan mengancam keutuhan NKRI.

Dari sistem kekuasaan yang semu dan remang-remang itu, rakyat yang semestinya mendapat pelayanan malah kerap terbengkalai dibanding dengan intensitas suguhan drama dan dagelan politik yang melelahkan, memuakan dan mungkin tidak produktif. Padahal kalau kita konsisten dengan 'pakem' konstitusi (UUD 1945) semuanya tidak perlu terjadi.

### **Pemilu Kepala Daerah**

Walau belum menyatu dengan pemilu nasional, namun pemilu kepala daerah untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota telah memiliki regulasi sendiri (UU No.12 tahun 2008). Dengan kata lain terkait dengan kepentingan pemilu kepala daerah, yang dulu

kerap menjadi polemik, sejak tahun 2008 peraturan perundang-undangnya telah keluar dari UU Nomor 32 tahun 2004. Secara demikian memilih kepala daerahpun telah menjadi regim pemilu.

Pada konteks demokrasi, pemilu kepala daerah tentu menguatkan demokrasi Indonesia. Partisipasi rakyat terbangun secara *bottom up*, dari arus akar rumput. Selain itu, pemilu kepala daerah telah memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, bahwa pemilu kepala daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan untuk menjadi kepala daerah. Artinya menjadi calon kepala daerah bukan hanya dimiliki partai politik, tetapi juga boleh dari perorangan. (pelajari UU nomor 12 tahun 2008 dan peraturan lainnya).

Kepala daerah yang terpilih pasti yang mendapat suara mayoritas. Persoalan kemudian pemilu kepala daerah dituding tidak efisien /pemborosan, atau kepala daerah terpilih kurang cerdas, atau kepala daerah kurang *madep* kepada pemerintah atasnya termasuk orientasi ke pusat, ini adalah soal lain di luar konteks demokrasi.

Menilai pemilu kepala daerah adalah pemborosan; biaya, waktu, tenaga dan pikiran adalah tuding prematur dibanding apa yang dibentangkan rakyat. Malah jika dihitung secara matematik, biaya pesta satu penduduk (sekitar Rp. 20.000/orang) itu sangat murah jika dibanding semangatnya memperbaiki nasib bangsa lima tahun ke depan. Soal efisisnesi ini dapat diatur dengan manajemen pemilu. Salah satu solusinya gabungan pemilu Bupati /Walikota, Gubernur dan Presiden dalam satu pemilu nasional. Seperti pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota. Ini pasti efisien dan kedaulatan rakyat tidak terganggu.

Soal kepala daerah terpilih kurang cerdas memajukan daerah, ini ranah kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang diusung partai politik, atau perorangan. Dari sisi ini partai politik dan masyarakat harus lebih selektif sebelum menetapkan calonnya daftar ke KPU. Persoalan kepala daerah kurang *madep*, kurang *depe-depe* (hormat) atau ada kesan mem-bangkang ke pemerintah atasnya, ini

adalah soal sistem komunikasi penyelenggaraan pemerintahan.

Secara demikian isu untuk kepala daerah (bupati/walikota) lebih baik dipilih oleh par-lemen di daerah, atau untuk gubernur ditunjuk oleh presiden menjadi kontra produktif untuk demokrasi. Kalau ini dilakukan, maka kekuasaan akan kembali menumpuk dan tersentralisasi di pemerintah pusat, rakyat dan daerah akan kembali melemah. Otonomi daerah dan demokrasi hanya sekedar slogan, dan bisa lebih buruk dari apa yang terjadi pada orba.

Persoalan lain yang paling penting pada pemilu kepala daerah atau bahkan pemilu apapun adalah sejauhmana efektivitas dari pemilu itu sendiri. Sejauh ini memang pemilu umumnya kurang efektif. Pilih dan yang calon yang dipilih baru sebatas memuaskan syahwat politik, untuk menjadi pemenang. Semua baru sadar, termasuk yang terpilihnya, ketika dalam perjalanan lima tahun. Jangankan konsep untuk memajukan daerah, bahkan konsep untuk diri sebagai kepala daerahpun tidak dikenalnya. Akhirnya membawa daerah dan memposisikan dirinya pada orientasi yang tersasar (disorientasi)

## Penutup

Meneropong demokrasi Indonesia dengan lensa pemilu kepala daerah tidak cukup memadai. Demokrasi akan tegak dan berkibar, manakala pilar-pilar; sistem kekuasaan, sistem pemerintahan, sistem politik, dan sistem lainnya kuat dan memancang. Jika pancangan pilar itu semu, pura-pura hanya seolah-olah, maka demokrasi inipun hanya 'mastur basi'; seolah-olah dan pura-pura kokoh, pura-pura kuat, padahal lemas dan terkulai.

Benar bahwa pemilu kepala daerah dapat ikut menguatkan demokrasi Indonesia, bahkan dapat menguatkan NKRI, sepanjang pemilu diniati untuk memperbaiki nasib bangsa. Namun kalau sekedar memuaskan sahwat politik seseorang, kelompok atau parpol, jangan terlalu berharap pemilu kepala daerah kaya makna untuk demokrasi Indonesia.

Demokrasi bagi rakyat tidak terlalu ribet, sehingga tidak perlu dipidatokan berapi api di podium-podium, tidak usah menggegar di

panggung-panggung. Demokrasi bagi rakyat sangat simpel; bebas untuk me-ngeluarkan pendapat, bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kebodohan. Sebaliknya kalau rakyat dibungkam, tertintimidasi, termiskinkan, terbodohkan, dan disana sini dilemahkan, maka demokrasi ini sakit dan gagal.

Para akademisi yang masih memiliki integritas dan keajegan, dituntut bukan hanya merekam yang senyatanya, tetapi juga harus memetakan, mendesain demokrasi Indonesia yang semestinya. Kini saatnya para aka-demisi berbuat di garda terdepan demokrasi semoga. !!!

## Daftar Pustaka

- Alfian, 1993. *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Arfani Noer Riza (Eds.) 1996. *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Rajawali Press, Jakarta,
- Azra Azyumardi, 1999. *Menuju Masyarakat Madani\_Gagasan Fakta dan Tantangan*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Beetham David, 1999. *Democracy and Human Rights*, Polity Press, Cambridge.
- Bhakti Ikrar Nusa dkk, 1999. *Tentara Mendamba Mitra*, Mizan Pustaka – PPW LIPI, Bandung.
- Budiman Arief & Van Ufford Ph. Quarles, 1988. *Krisis Tersembunyi Dalam Pembangunan*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Budiardjo Miriam, 1993. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Duverger Maurice, 1998. *Sosiologi Politik*, Rajawali Press, Jakarta.
- Dwiyanto Agus dkk, 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Pusat Studi kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Frederickson H. George, 1988. *Administrasi Negara Baru*, LP3ES, Jakarta.
- Prisma, (Kumpulan Tulisan) 1986. *Demokrasi dan Proses Politik*, LP3ES, Jakarta

- Gibson, Ivancevich & Donnelly, 1996. *Organisasi; Perilaku-Struktur dan Pro-ses*, (Jilid 1-2) Binaputera Aksara, Jakarta.
- Gidden Anthony & David Held, 1987. *Kelompok, Kekuasaan dan Konflik*, Rajawali Press, Jakarta.
- Greene H. Thomas Dkk, 1984. *Lembaga-Lembaga Politik*, Alih Bahasa Paul Rosyadi, Ind-Hill Co,
- IDEA Internasional, 2000. *Penilaian Demokratisasi di Indonesia*, Aamepro Graphic Design and Printing, Tlp. +628129414796
- Kantaprawira Rusadi, 1988. *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Karim M. Rusli, 1991. *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Ketchum M. Richard, 2004, *Demokrasi Sebuah Pengantar*, Niagara, ogyakarta,
- Latif Yudi, 2004. *Menuju Revolusi Demokratik; Mandat Untuk Perubahan Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Liddle R. William, 1987. *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, LP3ES, Jakarta.
- Mas'oeed Mohtar, 1993. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1994. *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Machiavelli Niccolo di Bernardo, 1997. *Politik Kekuasaan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- Madjid Nurcholish dkk, 1994. *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi Penga-laman Indonesia Masa Orde Baru*, Editor: Elza Peldi T. Yayasan Paramadina, Jakarta.
- Nimmo Dan, 1989. *Komunikasi Politik; Khalayak dan Efek*, (I,II, III) Remadja Karya CV. Bandung.
- Noer Deliar, 1982. *Pengantar Ke Pemikiran Politik*, Rajawali Press, Jakarta.
- Permana Setia, 2003. *Politik Indonesia Konspirasi Elit dan Perlawanan Rakyat*, Center For Political And Local Auto-nomy Studies, FISIP Unpas, Bandung.
- Prisma Seri, 1985. *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, Artikel Pilihan, LP3ES, Jakarta.
- Putra Fadillah, 2004. *Partai Politik & Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar Yogyakarta,.
- Rahardjo M. Dawam, 1988. *Esei-Esei Ekonomi Politik*, LP3ES, Jakaarta.
- Rakhmat Djalaluddin, 1999. *Rekayasa Sosial; Reformasi atau Revolusi*, Remadja Rosda Karya, Bandung.
- Ridjal Fauzie & Karim M. Rusli (eds.) 1991. *Dinamika Budaya dan Politik Dalam Pembangunan*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Sanit Arbi, 1985. *Perwakilan Politik Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sihbudi Riza & Nurhasim Moch, (eds.) 1999. *Amandemen Konstitusi & Strategi Penyelesaian Krisi Politik Indonesia*, AIPI. Jakarta.
- Sodikin Ikin, 2010, *Pemikiran dan Kekuatan Politik Indoensia*, Ceplas, Bandung.
- Soemantri Sri, 1986. *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Alumni, Bandung.
- Subekti Valina Singka, 1998, *Mengubur Sistem Politik Orde Baru*, Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI, Mizan, Bandung.
- Taher Elza Peldi (Eds.), 1993. *Demokrasi, Politik, Budaya dan Ekonomi*, PT. Temprint, Jakarta.
- Thaba Abdul Azis, 1996. *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Urbaningrum Anas, 2004. *Pemilu Orang Biasa*, Republika Penerbit, Jakarta.
- Usman Oetojo & Alfian, 1992. *Pancasila Sebagai Ideologi*, BP-7. Pusat.
- Varma SP. 1999. *Teori Politik Modern*, Rajawali Press, Jakarta.
- Widodo Joko, 2001, *Good Governance; Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desen-tralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendikia, Surabaya.
- Wirahadikusumah Agus, 1999. *Indonesia Baru dan Tantangan TNI*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta.